

Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik Dengan Pendekatan *Value For Money* Pada Kabupaten Bekasi

Denny Erica¹, Ahmad Yani², Hoiriah³, Ahmad Setiadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: ¹denny.dea@bsi.ac.id, ²ahmad.amy@bsi.ac.id, ³hoiriah.hrh@bsi.ac.id, ⁴ahmad.ams@bsi.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
12-03-2026	06-04-2026	22-04-2026

Abstrak - Kinerja keuangan sektor publik memerlukan penilaian sebagai bentuk evaluasi, sehingga kinerja keuangan menjadi lebih optimal. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Value for Money (VFM)* dengan 3 (tiga) faktor utama, yaitu: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas untuk tahun anggaran 2016-2025. Berdasarkan analisis dapat dikatakan kinerja keuangan sektor publik Kabupaten Bekasi sudah ekonomis dengan rata-rata 91,40% dan sangat efektif dengan rata-rata 102,42%, namun masih tidak efisiensi dengan rata-rata 100,70%. Hasil dari analisis ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk menjadikan kinerja keuangan sektor publiknya menjadi lebih efisien, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

Kata Kunci: Kinerja, Keuangan Sektor Publik, *Value For Money*

Abstract - Public sector financial performance requires assessment as a form of evaluation, so that financial performance becomes more optimal. The Financial Performance of the Bekasi Regency Regional Government in this study uses the Value for Money (VFM) approach with 3 (three) main factors, namely: Economy, Efficiency, and Effectiveness for the 2016-2025 Fiscal Year. Based on the analysis, it can be said that the financial performance of the Bekasi Regency public sector is already economical with an average of 91.40% and very effective with an average of 102.42%, but still not efficient with an average of 100.70%. The results of this analysis can be used as evaluation material for the Bekasi Regency Regional Government to make its public sector financial performance more efficient, so that the Bekasi Regency Regional Government can improve the quality of its services to the community to be more optimal.

Keywords: Performance, Public Sector Finance, *Value For Money*

PENDAHULUAN

Kinerja finansial merupakan salah satu isu terpenting yang perlu diperhatikan dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah. Sejak pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja, semua aktivitas pemerintah harus dapat mencapai kinerja keuangan yang baik. Penerapan akuntabilitas publik di organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, satuan kerja negara, kementerian, serta lembaga negara dapat mengurangi pengeluaran berlebihan dan kerugian finansial yang membuatnya tidak ekonomis. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan mengkaji kinerja keuangannya melalui perhitungan dan analisis pencapaian sasaran serta realisasi pendapatan dan pengeluaran dalam konteks lembaga tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencakup input, output, hasil, efek, dan keuntungan. Sangat krusial bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten

Bekasi untuk melakukan penilaian kinerja keuangan guna memastikan bahwa program kerjanya telah dilaksanakan dengan efektif, diharapkan dalam penilaian kinerja keuangannya memperhatikan nilai untuk uang dalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan adanya fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari perspektif *input*, *output*, *outcome*, *impact*, dan *benefitnya*, di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Geografis Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 1.2731,88 Km² atau setara dengan 127.388 hektar yang terdiri dari 23 kecamatan, 8 kelurahan, dan 180 desa, dengan pusat pemerintahannya di Kecamatan Cikarang. Sedangkan berdasarkan Demografi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memiliki jumlah penduduk 3.469.242 jiwa dengan rincian pria 1.752.916 jiwa dan wanita 1.716.326 jiwa (Pemda Kabupaten

Bekasi, 2026). Dengan jumlah wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar menjadikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi memiliki APBD yang cukup besar, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan dan evaluasi. Pada Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memiliki data pendapatan daerah sebesar Rp.7.882.481.848.227,- dan belanja daerah sebesar Rp.8.717.301.651.627,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp.834.819.803.400,- sehingga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dimana pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp.7.636.264.014.774,- naik sebesar Rp.246.217.833.453,- sehingga pendapatan daerah menjadi Rp.7.882.481.848.227,- namun pada anggaran belanja yang semula direncanakan sebesar Rp.8.471.083.818.174,- naik sebesar Rp.246.217.833.453,- sehingga anggaran belanja menjadi Rp.8.717.301.651.627,- (Bupati Bekasi, 2026). Maka penilaian kinerja dengan pendekatan *value for money* menjadi sangat penting sebagai bentuk evaluasi.

Pengukuran *Value for Money* (VFM) menurut Mahmudi, menekankan pada pencapaian hasil yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, yang berarti setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. (Zahra & Ismanto, 2025)

Value for Money (VFM) merupakan pendekatan evaluasi kinerja, khususnya di organisasi sektor publik yang dievaluasi berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program dengan mengacu pada tiga pilar nilai penting, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. (Salsabila et al., 2025)

Penyusunan, pembahasan, penetapan sampai dengan pengawasan pelaksanaan anggaran harus memperhatikan kinerja anggaran yang meliputi capaian kinerja, keluaran, hasil dan manfaat serta tepat tidaknya kelompok sasaran kegiatan yang dibiayai. (Esislahyenti et al., 2023)

Value for money (VFM) menjadi inti dalam pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, namun perlu mempertimbangkan juga input, output, dan outcome secara bersama-sama, dan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (Anik Yuesti et al., 2020). *Value for money* juga merupakan indikator kinerja sektor publik yang menunjukkan apakah anggaran yang dikeluarkan memberikan nilai baik bagi masyarakat (Erlinda Nur Aulia & Agustina Prativi Nugraheni, 2022). Dengan kata lain *Value for Money* (VFM) merupakan sebuah konsep yang mengevaluasi sejauh mana sumber daya (uang, waktu, dan tenaga) yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau bisnis membuahkan hasil yang

optimal. Dalam konteks sektor publik, VFM mengacu pada pengelolaan anggaran dan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. VFM didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: (1) Ekonomi: Gunakan input (sumber daya) dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Misalnya, pengadaan barang dan jasa dengan harga terbaik sesuai standar kualitas yang dipersyaratkan, (2) Efisiensi: Hubungan antara input dan output, yaitu seberapa efisien sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan output. Semakin sedikit input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang sama, semakin efisien output tersebut, (3) Efektivitas: Sejauh mana tujuan atau hasil yang diinginkan tercapai. Efektivitas diukur dari sejauh mana output yang dihasilkan mencapai hasil yang diinginkan, misalnya peningkatan pelayanan publik atau dampak positif terhadap masyarakat.

Tabel 1. Persentase Hasil Dari 3 (Tiga) Faktor Konsep *Value for Money*

(%)	Hasil Ekonomi	Hasil Efisiensi	Hasil Efektivitas
>100%	Sangat Ekonomi	Tidak Efisiensi	Sangat Efektif
90%-100%	Ekonomi	Kurang Efisiensi	Efektif
80%-90%	Cukup Ekonomi	Cukup Efisiensi	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Ekonomi	Efisiensi	Kurang Efektif
<60%	Tidak Ekonomi	Sangat Efisiensi	Tidak Efektif

Sumber: N. Qolbuniah & A.B. Setiawan (2022)

Keuntungan yang akan didapatkan dari penerapan konsep *value for money* (VFM) pada sektor publik, yaitu: (1) Meningkatkan efisiensi pelayanan publik, (2) peningkatan kualitas pelayanan publik, (3) menurunkan biaya pelayanan publik dengan meminimalkan kerugian yang tidak efisien dan memaksimalkan penggunaan input yang hemat biaya, (4) pengalokasian dana belanja yang lebih sesuai dengan kepentingan umum, dan (5) meningkatkan kesadaran masyarakat akan uang sebagai landasan akuntabilitas public. (Mardiasmo, 2021)

Pendekatan VFM sangat penting untuk akuntabilitas yang memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan dan bertanggung jawab (Alfredo et al., 2024). Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran dan identifikasi ini penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran, memangkas pemborosan, dan

memastikan dana dialokasikan sesuai dengan prioritas utama masyarakat. (Prameswari et al., 2025)

Konsep *value for money* pada dasarnya juga merupakan konsep untuk mengukur efektivitas dan efisiensi biaya suatu program, kegiatan, atau kinerja organisasi sektor publik. Maka *value for money* menjadi konsep penting dalam organisasi sektor publik dan oleh karena itu sering disebut sebagai inti pengukuran kinerja di sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengetahui tingkat indikator kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif suatu keadaan dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran, penampilan dan hasilnya. (Arikunto, 2019)

Penelitian deskriptif dalam metode kuantitatif memberikan gambaran yang jelas tentang subjek maupun objek yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa mengubah kondisi yang ada. (Zahra & Ismanto, 2025)

Penelitian ini menggunakan data tahunan untuk menganalisis perubahan komponen laporan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada periode tahun 2016-2025. Konsep *Value for Money (VFM)*, dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi dari tiga faktor utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, untuk mengevaluasi kinerja keuangan sektor publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan APBD – Otonomi Daerah dan Pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014). Maka dalam menyelenggarakan pemerintahan di bawah yurisdiksi lokal, diperlukan sumber daya keuangan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada penduduk setempat. Penyediaan sumber daya keuangan kepada daerah harus diimbangi dengan beban administratif yang dibebankan kepada daerah tersebut. Keseimbangan sumber daya keuangan ini menjamin terlaksananya tugas-tugas administratif yang dipercayakan kepada pemerintah daerah. Apabila daerah tidak mempunyai kemampuan keuangan yang cukup untuk membiayai urusan pemerintahan, khususnya urusan wajib pemerintahan

yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam melaksanakan tugas administratif yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah (perda) yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Berikut adalah data Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2016-2025, yaitu:

Tabel 2. Laporan Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi (Tahun Anggaran 2016-2025) (Dalam Miliaran Rupiah)

Thn	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2016	4.266,95	4.575,14	5.156,51	4.899,02
2017	4.637,82	4.992,47	5.160,87	4.846,11
2018	5.051,33	5.194,98	5.794,42	5.057,70
2019	5.442,02	5.672,56	5.933,74	5.547,60
2020	5.825,84	5.558,32	6.470,20	5.479,34
2021	5.774,75	6.015,71	6.698,23	6.192,20
2022	5.603,41	5.896,62	6.467,18	6.169,83
2023	6.061,45	6.235,04	6.876,80	6.449,56
2024	7.364,42	7.186,02	7.797,55	7.221,34
2025	7.636,26	7.406,89	8.471,08	7.229,85

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (2026)

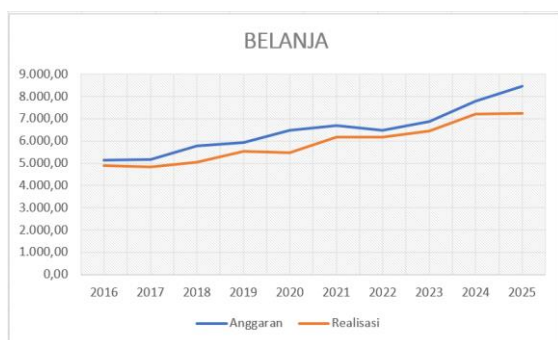
Dari Tabel 2 diatas dapat terlihat ada nilai selisih antara nilai anggaran dengan nilai realisasi Pendapatan untuk tahun anggaran 2016-2025, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terlihat telah berhasil memperoleh Pendapatan diatas dari anggaran (target) yang sudah di tentukan sebelumnya, hal ini dapat terlihat pada Gambar. 1 dibawah ini:



Sumber: Olah Data (2026)

Gambar 1. Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016-2025

Dari Tabel 2 diatas dapat terlihat ada nilai selisih antara nilai anggaran dengan nilai realisasi biaya (pengeluaran) untuk tahun anggaran 2016-2025, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terlihat fluktuatif dari anggaran (target) yang sudah di tentukan sebelumnya, hal ini dapat terlihat pada Gambar. 2. dibawah ini:



Sumber: Olah Data (2026)

Gambar 2. Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016-2025

Dari data Tabel 2 dapat dihitung *Value for Money (VFM)* yang terdiri dari tiga faktor utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, untuk mengevaluasi kinerja keuangan sektor publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Rasio Ekonomi

Tabel 3. Rasio Ekonomi

Thn	Belanja		(%)	Kesimpulan
	Anggaran	Realisasi		
2016	5.156,51	4.899,02	95,01	Ekonomis
2017	5.160,87	4.846,11	93,90	Ekonomis
2018	5.794,42	5.057,70	87,29	Cukup Ekonomis
2019	5.933,74	5.547,60	93,49	Ekonomis

2020	6.470,20	5.479,34	84,69	Cukup Ekonomis
2021	6.698,23	6.192,20	92,45	Ekonomis
2022	6.467,18	6.169,83	95,40	Ekonomis
2023	6.876,80	6.449,56	93,79	Ekonomis
2024	7.797,55	7.221,34	92,61	Ekonomis
2025	8.471,08	7.229,85	85,35	Cukup Ekonomis

Sumber: Olah Data (2026)

Berdasarkan Tabel 3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat dikatakan Ekonomis dengan rata-rata 91,40%

2. Rasio Efisiensi

Tabel 4. Rasio Efisiensi

Thn	Realisasi		(%)	Kesimpulan
	Belanja	Pendapatan		
2016	4.899,02	4.575,14	107,08	Tidak Efisiensi
2017	4.846,11	4.992,47	97,07	Kurang Efisiensi
2018	5.057,70	5.194,98	97,36	Kurang Efisiensi
2019	5.547,60	5.672,56	97,80	Kurang Efisiensi
2020	5.479,34	5.558,32	98,58	Kurang Efisiensi
2021	6.192,20	6.015,71	102,93	Tidak Efisiensi
2022	6.169,83	5.896,62	104,63	Tidak Efisiensi
2023	6.449,56	6.235,04	103,44	Tidak Efisiensi
2024	7.221,34	7.186,02	100,49	Tidak Efisiensi
2025	7.229,85	7.406,89	97,61	Kurang Efisiensi

Sumber: Olah Data (2026)

Berdasarkan Tabel 4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat dikatakan Tidak Efisien dengan rata-rata 100,70%

3. Rasio Efektivitas

Tabel 5. Rasio Efektivitas

Thn	Pendapatan		(%)	Kesimpulan
	Anggaran	Realisasi		
2016	4.266,95	4.575,14	107,22	Sangat Efektif
2017	4.637,82	4.992,47	107,65	Sangat Efektif
2018	5.051,33	5.194,98	102,84	Sangat Efektif
2019	5.442,02	5.672,56	104,24	Sangat Efektif
2020	5.825,84	5.558,32	95,41	Efektif
2021	5.774,75	6.015,71	104,17	Sangat Efektif
2022	5.603,41	5.896,62	105,23	Sangat Efektif
2023	6.061,45	6.235,04	102,86	Sangat Efektif
2024	7.364,42	7.186,02	97,58	Efektif
2025	7.636,26	7.406,89	97,00	Efektif

Sumber: Olah Data (2026)

Berdasarkan Tabel 5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat dikatakan Sangat Efektif dengan rata-rata 102,42%

Tabel 6. Presentase Tiga Faktor Utama *Value for Money (VFM)*

Tahun	Presentase (%)		
	Ekonomi	Efisiensi	Efektivitas
2014	95,01	107,08	107,22
2015	93,90	97,07	107,65
2016	87,29	97,36	102,84
2017	93,49	97,80	104,24
2018	84,69	98,58	95,41
2019	92,45	102,93	104,17
2020	95,40	104,63	105,23
2021	93,79	103,44	102,86
2022	92,61	100,49	97,58
2023	85,35	97,61	97,00
Rata-rata	91,40	100,70	102,42

Sumber: Olah Data (2026)

Berdasarkan Tabel 6. Presentase Tiga Faktor Utama *Value for Money (VFM)*, diperoleh hasil analisis kinerja keuangan sektor publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi selama Tahun Anggaran 2016-2025, kinerja keuangan sektor publik Kabupaten Bekasi dari komponen ekonomi 91,40%,

Efektivitas 102,42%, dan efisiensi 100,70%. Dari presentase tersebut dapat dikatakan bahwa Kinerja Sektor Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah ekonomis dan sangat efektif, namun masih terkategori tidak efisien dengan tingkat presentase 100,70% yang menunjukkan realisasi belanja daerah masih relatif besar daripada pendapatan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan sektor publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan pendekatan *Value for Money (VfM)* selama Tahun Anggaran 2016-2025 dapat dikatakan kinerja keuangan sektor publik Kabupaten Bekasi sudah ekonomis dengan rata-rata 91,40% dan sangat efektif dengan rata-rata 102,42%, namun masih tidak efisiensi dengan rata-rata 100,70%, dan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk menjadikan kinerja keuangan sektor publiknya menjadi lebih efisien, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

REFERENSI

- Alfredo, Tandirau, F., Tandiamal, F. G., Edo, T. J., Meerbothe, V. V., R.P., Y. S., & Asri, M. (2024). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2023). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(No. 1 Maret 2024), 397–401. <https://doi.org/https://doi.org/10.60126/maras.v3i1.751>
- Anik Yuesti, Ni Luh Putu Sandra Dewi, & I Gusti Ayu Asri Pramesti. (2020). *Akuntansi Sektor Publik* (Pertama). Noah Aletheia.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bupati Bekasi. (2026). *Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang PerubahanKetiga Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/334204/per-bup-kab-bekasi-no-10-tahun-2025>
- DJPk Kementrian Keuangan. (2026). *Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kabupaten Bekasi*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2016&provinsi=10&pemd a=02>
- Erlinda Nur Aulia, & Agustina Prativi Nugraheni. (2022). Analisis Value For Money Dengan Pendekatan Efektivitas Pada Kinerja Keuangan Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2017-2021. *TRANSEKONOMIKA*, 2(6).

- <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/308/247>
- Esislahyenti, Mursalini, W. I., & Indrawati, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(No. 3), 26454–26465.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10869/8651>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- N. Qolbuniah, & A.B. Setiawan. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pusat Pengembangan ASN-BKN Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara - Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2017-2018). *KarimahTauhid*, 1(5).
<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/6955/3335>
- Pemda Kabupaten Bekasi. (2026). *Sistem Informasi Data Agregat KepeNdudukan Terintegrasi (SIDANTA)*. Disdukcapil Kabupaten Bekasi.
<https://sidanta.bekasikab.go.id/Sidanta/>
- Prameswari, M. P., Safitri, R. A., Karima, N., & Gunawan, A. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik dengan Pendekatan Value for Money di Kota Pekalongan (Tahun 2021-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(No. 1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.2014>
- Salsabila, N., Pratiwi, I., & Dasila, R. A. (2025). Measurement of Local Government Financial Performance in Palopo City using The Concept of Value For Money. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research (JABTER)*, 4(No. 3), 536–550.
<https://doi.org/10.54408/jabter.v4i3.413>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23>
- Zahra, A. I., & Ismanto, S. U. (2025). Pengukuran Kinerja Anggaran Dengan Pendekatan Value for Money. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(No. 2), 761–778.